

PENGARUH KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERN, KEADILAN KOMPENSASI DAN PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP INDIKASI TERJADINYA *FRAUD* PADA PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (SKPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Taufik Hidayat BT¹, Mohammad Iqbal B dan Muh Ikbal A²

taufikhidayatipal@gmail.com

¹Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to identify and analyze the relationship between direct and indirect between the effectiveness of internal control, equity compensation and understanding of government accounting standards for indications of fraud through the commitment of the organization as an intervening variable. The results showed that the seven hypotheses have met the statistical criteria for the analysis of PLS (Partial Least Squares). Respondents in this study is the head managers, Head of Sub Division of Finance, Treasurer and Treasurer Revenue Expenditure amounted to 140 people from each SKPD and techniques of data collection with questionnaires. The analytical tool used is the analysis of PLS (Partial Least Squares) with the help of statistical program WarpPLS version 2.0. The results showed that the seven hypotheses have met the statistical criteria for the analysis of PLS (Partial Least Squares). The results of this study stated that, directly or indirectly, the effectiveness of internal control, equity compensation and understanding of government accounting standards had a significant influence on the indication of fraud through the commitment of the organization as an intervening variable in financial managers in Central Sulawesi province.

Keywords: *Effectiveness of Internal Control, Justice Compensation Understanding Government Accounting Standards, Organizational Commitment, Fraud Indication.*

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) dalam report to the nation tahun 2010 menyatakan bahwa *fraud* merupakan topik yang hangat dibicarakan dikalangan praktisi maupun akademisi pada beberapa dekade ini. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja.

Dilansir dari harian MetroSulawesi pada tanggal 6 Juni 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah menganggap Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melanggar dan tidak patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014. Hal ini ditunjukkan dari beberapa temuan seperti

belanja pegawai sebesar Rp.769.190.000,00 tidak sesuai ketentuan dan memboroskan keuangan daerah dan, tindak kecurangan yang terjadi seperti belanja perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berindikasi tidak benar sebesar Rp.3.040.650.600,00 yang disebabkan terjadinya pemalsuan bukti dan laporan pertanggung jawaban yang fiktif. Temuan ini mengindikasikan bahwa *fraud* masih terjadi dan sangat merugikan keuangan daerah.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah diatas ialah mewujudkan sistem pengendalian yang baik dengan menerbitkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keadilan dalam instansi pemerintah dapat dilihat berdasarkan kompensasi yang diterima pegawai, apabila kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan maka akan memotivasi pegawai untuk berperilaku curang (*fraud*). Fenomena yang terjadi saat ini di banyak Negara tidak terkecuali di Indonesia, bahwa kompensasi yang sesuai merupakan pemicu seseorang melakukan tindak kecurangan. Menurut Priantara (2013:43), penyebab terjadi sebuah kecurangan dalam sebuah instansi antara lain dikarenakan instetif, kesempatan, rasionalitas, dan kemampuan. Fenomena diatas diperkuat oleh kasus besar yang dilakukan oleh Rohadi yang merupakan seorang PNS (Pegawai Negri Sipil) setingkat PN. Rohadi memiliki sebuah rumah sakit, kapal, proyek perumahan, *water boom* dan 17 mobil. Rohadi tersangkut kasus kasus penerimaan gratifikasi terkait pengurusan perkara hukum di Mahkamah Agung dan suap sebesar 250 Juta untuk pengurangan masa kurungan artis Saipul Jamil. Kasus tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya kompensasi yang diterima dapat membuat seseorang melakukan tindak kecurangan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dari tindak kecurangan ialah dengan adanya pemahaman atas standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuanganyang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

Keterkaitan staf dengan suatu organisasi dikenal dengan istilah komitmen organisasi. Komitmen organisasi dapat ditafsirkan sebagai suatu keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaanya di dalam organisasi dan kesadaran untuk melaksanakan upaya yang telah diperhitungkan bagi kepentingan organisasi. Menurut Haerani (2004) komitmen yang baik merupakan dasar kuat untuk motivasi penggunaan sumber daya, sarana, prasarana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh organisasi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu komitmen organisasi merupakan elemen yang akan mempengaruhi turunya tindak kecurangan dalam suatu organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui judul “pengaruh keefektifan pengendalian intern, keadilan kompensasi, dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap indikasi terjadinya *fraud* pada pengelola keuangan di SKPD Provinsi Sulawesi Tengah dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening”.

METODE

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan secara langsung dan tidak langsung antara keefektifan pengendalian intern, keadilan kompensasi dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap indikasi terjadinya *fraud* melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Adapun populasi dalam penelitian ini mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun

2005 dinyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai wewenang untuk mendelegasikan mandat pengelolaan keuangan daerah kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerimaan Atau Pengeluaran. Merujuk pada PP Nomor 58 Tahun 2005 maka, populasi dalam penelitian ini ialah seluruh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerimaan atau Pengeluaran pada 45 SKPD Provinsi Sulawesi Tengah.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel ialah adalah jabatan yang pengelolanya minimal 2 orang dalam SKPD serta terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan di setiap SKPD. Setiap SKPD terdiri dari 4 responden yaitu 1 kuasa pengguna anggaran, 1 Pejabat penatausahaan keuangan dan 2 Bendahara (penerimaan dan pengeluaran), maka total sampel dari 42 SKPD berjumlah 168.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk membedakan variabel terikat (*dependen variabel*), variabel bebas (*independen variabel*) dan variabel penghubung atau antara (*intervening variabel*) dari sub variabel serta indikator dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah keefektifan Pengendalian Intern, keadilan kompensasi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan sebagai variabel independen yang di simbolkan dengan variabel X. Kecenderungan *fraud* sebagai variabel dependen yang disimbolkan dengan variabel Y serta komitmen organisasi sebagai variabel antara/penghubung yang disimbolkan Z.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian

intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi. Alat ukur yang digunakan untuk indikator sistem pengendalian intern pemerintah adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Menurut Noprian (2012) keadilan kompensasi adalah persepsi tentang sejauh mana perbandingan relatif antara masukan berupa uang yang diterima dengan hasil yang diterima dari tempat seseorang bekerja, serta proses dan prosedur yang digunakan untuk mengalokasikan hasil tersebut. Keadilan kompensasi menjadi alasan utama mengapa kebanyakan orang mencari pekerjaan. Keadilan yang diberikan dalam bentuk kompensasi merupakan dasar utama yang dijadikan acuan oleh pekerja dalam memberikan loyalitas mereka terhadap organisasi. Berdasarkan pendapat diatas maka alat ukur yang digunakan sebagai indikator keadilan kompensasi ialah dalam bentuk jenis kompensasi itu sendiri yang terdiri gaji, insentif, tunjangan dan asuransi.

Ketaatan aturan akuntansi adalah suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur pemahaman SAP ialah komponen yang terdiri dari PSAP 01 sampai PSAP 11.

Prayitno (2004:23) memberikan pengertian bahwa pegawai yang mempunyai komitmen terhadap satuan kerja menunjukkan kuatnya pengenalan dan keterlibatan pegawai dalam satuan kerja Sopiah (2008:164) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi komitmen organisasi adalah: Faktor personal : harapan pekerjaan, karakteristik personal, *job choice factor* , Faktor Organasional: lingkup kerja, supervisi, konsistensi tujuan organisasi dan Faktor bukan dari dalam organisasi: ketersediaan pekerjaan alternatif.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi ACFE dalam Tuanakotta (2010: 195-204) membagi *fraud* (kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan,yaitu: kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*) dan korupsi (*corruption*).

Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dengan software *WarpPLS* versi 2.0. Alasan peneliti menggunakan metode ini, karena penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen, sebuah variabel dependen dan variabel intervening. Penelitian ini juga bersifat laten karena memerlukan indikator atau pernyataan-pernyataan untuk menjelaskan serta sampelnya yang besar sehingga alat analisis yang cocok adalah dengan menggunakan PLS.

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Kategori pertama adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dengan indikatornya (*loading*). Ketiga, berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi 3 tahap dan setiap tahap menghasilkan estimasi. Tahap pertama, menghasilkan *weight estimate*, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga

menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (Ghozali, 2011).

Pembuktian Hipotesis

Peneliti merumuskan tujuh hipotesis di mana masing-masing hipotesis tersebut akan diuji dengan teknik pembuktian hipotesis menurut Mahfud (2013). Mahfud (2013) yang menyatakan suatu model diterima apabila nilai *p-value* kurang dari atau sama dengan 0,05. Kemudian untuk model tidak langsung dasar penerimaan dan penolakannya mengacu pada pendapat Mahfud (2013) yang menjelaskan salah satu cara untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh pada suatu model hubungan tidak langsung ialah dengan memasikan jalur dalam model telah memenuhi kriteria *P-value* < 0.01.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel diukur menggunakan 48 indikator dan terdiri dari 80 item pertanyaan dengan 5 skala likert. Secara keseluruhan variabel dalam penelitian ini memiliki nilai maksimum 5 dan nilai minimum 2. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pula bahwa seluruh indikator memiliki nilai standar deviasi dari keseluruhan indikator variabel lebih kecil dari nilai *mean*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat representasi variabel dalam penelitian ini baik sebagai representasi data.

Hasil Analisis *Structural Equation Model* (SEM) menggunakan *Partial Least Square (PLS)*

Hasil analisis *Partial Least Square (PLS)* menunjukkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi seluruh pengujian *inner* dan *outer model* yang meliputi *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, uji kecocokan model (*model fit*) *path coefficient*, dan *R-squared*. Merujuk pada pendapat Mahfud (2013) yang menyatakan bahwa suatu

dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak dalam suatu model ialah apabila nilai *p-value* kurang dari atau sama dengan 0,05. Untuk model hubungan secara langsung yang terdiri dari hipotesis 1 sampai 4 telah memenuhi syarat tersebut dan nilai R^2 masing masing 20 %, 42 %, 40 %, dan 65 %. Nilai R^2 tersebut memberikan gambaran seberapa besar keefektifan pengendalian intern, keadilan kompensasi, pemahaman standar akuntansi pemerintah dan komitmen organisasi terhadap indikasi terjadinya *fraud*.

Sedangkan untuk model penelitian secara tidak langsung merujuk pada pendapat Mahfud (2013) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh pada suatu model hubungan tidak langsung ialah dengan memasikan jalur dalam model tersebut telah memenuhi kriteria $P\text{-value} < 0.01$. Berdasarkan pendapat diatas, hipotesis 5,6 dan 7 yang menguji hubungan tidak langsung telah memenuhi syarat. Selanjutnya hipotesis 5,6 dan 7 mengalami penurunan nilai koefisien ketika dimasukkannya variabel mediasi. Hal ini apabila lerujuk pada pendapat Mahfud (2013) yang menyatakan bahwa apabila nilai koefisien menurun setelah dimasukkannya variabel pemediasi maka akan menimbulkan hubungan parsial atau masih terdapat kaitan dengan pengaruh langsung.

Menurut Hairs *et al.* (2011) tahap selanjutnya ialah menghitung total pengaruh tidak langsung dan analisis mediasi *SEM-PLS* dapat digunakan metode *variance accounted for (VAF)*. Berdasarkan hasil perhitungan *variance accounted for (VAF)* untuk hipotesis tidak langsung (hipotesis 5,6 dan 7) menghasilkan tingkat pengaruh total masing masing 40,50 %, 34,64 % dan 35,48 %. Persentase tersebut menjelaskan berapa besar hubungan tidak langsung dalam model tersebut.

Hasil Pembuktian Hipotesis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan terhadap hipotesis 1 tentang hubungan keefektifan pengendalian intern terhadap indikasi *fraud* menunjukkan bahwa variabel keefektifan pengendalian intern memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indikasi *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya suatu pengendalian intern maka akan menurunkan indikasi terjadinya *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Suryanajaya (2012) dalam konsep sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang menyatakan bahwa secara konsep pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik korupsi dan tindak kecurangan lainnya karena proses pemerintahan akan dilakukan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh masyarakat dan di pertanggung jawabkan secara berkala.

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan terhadap hipotesis 2 tentang hubungan keadilan kompensasi terhadap indikasi *fraud* menunjukkan bahwa variabel keadilan kompensasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indikasi *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya suatu keadilan terhadap kompensasi maka akan menurunkan indikasi terjadinya *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Priantara (2013) yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi yang dialami seseorang dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan. Tekanan yang dialami oleh seseorang akan menyebabkan seseorang berani untuk melakukan tindakan kecurangan.

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan terhadap hipotesis 3 tentang hubungan pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap indikasi *fraud* menunjukkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indikasi *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin

baiknya pemahaman akan standar akuntansi pemerintahan maka akan menurunkan indikasi terjadinya *fraud*. Penelitian ini sejalan dengan Wiraputra (2015) yang menyatakan bahwa sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan, maka berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP sehingga akan membantu dalam proses menghindarkan dari tindak kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) dalam proses pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan terhadap hipotesis 4 tentang hubungan komitmen organisasi terhadap indikasi *fraud* menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indikasi *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya komitmen dalam organisasi maka akan menurunkan indikasi terjadinya *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal ini dilihat dari upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dilakukan dengan memperbaiki moral dari pengelolaan perusahaan yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan.

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan terhadap hipotesis 5 tentang hubungan keefektifan pengendalian intern terhadap indikasi *fraud* melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa variabel keefektifan pengendalian intern secara tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indikasi *fraud* melalui variabel komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi tingkat keefektifan pengendalian intern dalam

menurunkan indikasi terjadinya *fraud*. Penelitian ini sejalan dengan pedoman sistem pengendalian intern dalam PP 60 Tahun 2008 dan Suryanjaya (2012) yang menyatakan bahwa selain dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian, sistem pengendalian juga memperhatikan aspek integritas, nilai etika, moral dan komitmen sumber daya sebagai kerangka pembangunan sistem pengendalian, dimana dalam peraturan ini dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif merupakan komponen yang sangat penting dalam organisasi dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu menjaga asset negara, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan terhadap hipotesis 6 tentang hubungan keadilan kompensasi terhadap indikasi *fraud* melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa variabel keadilan kompensasi secara tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indikasi *fraud* melalui variabel komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi tingkat keadilan kompensasi dalam menurunkan indikasi terjadinya *fraud*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ambrose (2009) yang menyatakan bahwa keadilan dalam organisasi (kompensasi) memiliki potensi untuk menciptakan manfaat yang kuat bagi organisasi maupun pegawai, seperti membangun kepercayaan dan komitmen yang lebih besar, meningkatkan prestasi kerja, membangun kepuasan dan loyalitas untuk mengurangi konflik seperti *fraud* akibat dari ketidakadilan yang diterima.

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan terhadap hipotesis 7 tentang hubungan pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap indikasi *fraud* melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan secara tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap indikasi *fraud* melalui variabel komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi tingkat pemahaman standar akuntansi pemerintahan dalam menurunkan indikasi terjadinya *fraud*. Penelitian ini sejalan dengan Kusumastuti (2012) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi yang merupakan kondisi dimana pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Apabila dalam bekerja seorang pegawai mematuhi standar akuntansi yang ada maka akan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa pegawai yang mempunyai komitmen organisasi tinggi, maka ia akan berperan serta secara aktif dan melakukan segala upaya demi tercapainya tujuan organisasi termasuk menaati dan memahami standar dan sistem yang ada. Pegawai yang taat pada standar yang telah ditetapkan tidak akan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan organisasi seperti tindak kecurangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan:

1) Tindak kecurangan diminimalisir dengan adanya suatu sistem pengendalian intern yang efektif dan kualitas penendalian yang baik serta didukung oleh kepatuhan para pegawai terhadap sistem pengendalian. Berdasarkan hal tersebut maka suatu keefektifan pengendalian intern terbukti mempengaruhi secara langsung indikasi terjadinya *fraud* pada pengelola keuangan

- di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Tindakan curang yang dilakukan disebabkan oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Tindakan kecurangan didorong oleh ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Berdasarkan hal tersebut maka keadilan kompensasi terbukti mempengaruhi secara langsung indikasi terjadinya *fraud* pada pengelola keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 - 3) Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap standar agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan membantu dalam proses menghindarkan dari tindak kecurangan laporan keuangan dalam proses pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pemahaman standar akuntansi pemerintahan terbukti mempengaruhi secara langsung indikasi terjadinya *fraud* pada pengelola keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 - 4) Salah satu upaya untuk menghilangkan perilaku kecurangan dapat dilakukan dengan memperbaiki moral yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap organisasi. Apabila terdapat komitmen yang tinggi terhadap instansi berarti pegawai juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap instansi. Berdasarkan hal tersebut maka komitmen organisasi terbukti mempengaruhi secara langsung indikasi terjadinya *fraud* pada pengelola keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - 5) Sistem pengendalian yang efektif selain dapat mengurangi risiko terjadinya kerugian, dan penyimpangan, sistem pengendalian juga memperhatikan aspek

integritas, nilai etika, moral dan komitmen sumber daya sebagai kerangka pembangunan sistem pengendalian, dimana dalam peraturan ini dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif merupakan komponen yang sangat penting dalam organisasi dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang bebas dari tindak kecurangan. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu menjaga *asset* negara, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa keefektifan pengendalian intern mempengaruhi secara tidak langsung indikasi terjadinya *fraud* pada pengelola keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui komitmen organisasi.

- 6) Keadilan dalam organisasi (kompensasi) memiliki potensi untuk menciptakan manfaat yang kuat bagi organisasi maupun pegawai, seperti membangun kepercayaan dan komitmen yang lebih besar, meningkatkan prestasi kerja, membangun kepuasan dan loyalitas untuk mengurangi konflik seperti *fraud* akibat dari ketidakadilan yang diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan Kompensasi terbukti mempengaruhi secara tidak langsung indikasi terjadinya *fraud* pada pengelola keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui komitmen organisasi.
- 7) Taat terhadap aturan akuntansi dapat memperkecil perilaku curang. Kegagalan dalam proses penyusunan laporan keuangan disebabkan oleh ketidaktaatan manajemen pada aturan akuntansi, di mana hal tersebut akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor. Perilaku menyimpang dari aturan berpengaruh terhadap pilihan kebijakan dan

tindakan yang menguntungkan diri sendiri dimana hal tersebut bermula dari tidak adanya komitmen dalam diri pelaku. Berdasarkan hal tersebut maka pemahaman standar akuntansi pemerintahan terbukti mempengaruhi secara tidak langsung indikasi terjadinya *fraud* pada pengelola keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui komitmen organisasi.

- 8) Metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner ke responden. Peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung terhadap responden sehingga peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas di lokasi penelitian sehingga kesimpulan hanya berdasarkan data yang telah diambil serta pengamatan yang ada di lapangan.
- 9) Penelitian ini terkendala dari beberapa responden yang tidak mengembalikan kuisoner penelitian serta menghilangkan kuisoner sehingga mengakibatkan data yang diolah dalam penelitian ini tidak mencapai total sampel yang telah ditentukan pada bab 3.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, peneliti merumuskan sejumlah saran kepada sejumlah pihak sebagai berikut:

1. Penelitian sebaiknya dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden sehingga peneliti dapat melihat secara langsung aktivitas responden dalam penggunaan dan pemahaman keefektifan pengendalian intern, keadilan kompensasi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, komitmen organisasi dan indikasi *fraud*.
2. Variabel independen yang diteliti juga terbatas pada keefektifan pengendalian intern, keadilan kompensasi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan komitmen organisasi. Hasil yang berbeda mungkin terjadi jika melibatkan variabel

lainnya seperti persepsi auditor, konsep audit investigatif, kualitas sumber daya manusia dan lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- ACFE. 2010. *Report to the Nations on Occupational and Abuse*. United States: ACFE
- Ambrose, M. Schminke, M. 2009. The Role Of Overall Justice Judgments In Organizational Justice Research: A Test Of Mediation. *Journal Of Applied Psychology*, Vol. 94, No. 2 Emerald Group Publishing Limited , 491-500.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013. Sulawesi Tengah
- COSO. 2002. *Fraudulent Financial Reporting*. New York: COSO
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hairs, J., W. Black, B Babin, dan R. Anderson. 2011. *Multivariate Data Analysis: A Global Perspective*. New Jersey: Pearson
- Khadarisman. 2012. *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusumastuti, Nur Ratri. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. Semarang: Universitas Diponegoro
- Kusumawardhani, Prisca. 2011. Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis Fraud Triangle pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Universitas Negri Surabaya*.
- Mahfud, Sholihin. Dwi, Ratmono. 2013. Analisis SEM-PLS Dengan Warppls 3.0 Untuk Hubungan Non Linier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis. Andi Yogyakarta.
- Mustika, Dian. Hastuti, Sri. Harningsih, Suchyo. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung 2016*
- Najahningrum, Fatun Anik. 2013. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi Diy. *Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado, 25 – 28 September 2013*.
- Nopdian, S, K. 2012. Pengaruh Kompensasi dan Pemberdayaan Terhadap Kinerja Pegawai pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau. *TAPM Magister Akuntansi Universitas Terbuka Jakarta*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Pramudita, Aditya. 2013. Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing and Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rizal, Jose. 2015. Sulteng Raih Wtp Murni, Penilaian Bpk Dianggap Aneh. [Http://www.Metrosulawesi.Com](http://www.Metrosulawesi.Com)
- Singleton, Tommi W., Aaron J. Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. John Wiley And Sons, Inc. New York.
- Suryanajaya. 2012. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: CV Eko Jaya
- Syamsi, Dinul. Yunilma. Yeasy, Darmayanti. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
Jurnal Akuntansi. Universitas Bung
Hatta

Thoyibatun. 2009. Analysing The Influence Of
Internal Control Compliance And
Compensation System Against Unethical
Behavior And Accounting Fraud
Tendency (Studies At State University
In East Java. Palembang: Simposium
Nasional Akuntansi XII.

Tuanakotta, Theodorus M. 2012. Akuntansi
Forensik Dan Audit Investigatif. Jakarta:
Salemba Empat.

Veithzal, Rivai. 2011. Manajemen Sumber
Daya Manusia Untuk Perusahaan.
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Wijaya, Henryanto. 2008. Standar Akuntansi
Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun
2005) Untuk Pengelolaan Keuangan
Negara Yang Transparan Dan
Akuntabel. Jurnal Akuntansi/Tahun XII
No.3. 313-323

Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang
Berpengaruh Terhadap Kecenderungan
Kecurangan Akuntansi: Studi pada
Perusahaan Publik dan Badan Usaha
Milik Negara Di Indonesia. Simposium
Nasional Akuntansi 9 Padang.

Wiraputra, Kusuma. Wayan. 2014. Pengaruh
Pemahaman Standar Akuntansi
Pemerintahan Dan Latar Belakang
Pendidikan Terhadap Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten
Klungkung).e-journal. Singaraja.